

# KESADARAN MASYARAKAT MAJEMUK DAN KEBHINEKA TUNGGAL IKAA-AN KEBUDAYAAN DI INDONESIA

Oleh : Wilodati\*)

## Pendahuluan

Lambang negara kita Bhineka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi satu jua, bukanlah hanya berfungsi sebagai permainan buah bibir saja tetapi telah dibuat oleh para pelopor pendiri negara kita untuk melambangkan keanekaragaman masyarakat dan kebudayaan yang bersatu dalam wadah satu masyarakat dan negara Indonesia dengan satu kebudayaan nasional yang dijiwai oleh Pancasila dan UUD 1945.

Berdasarkan atas tipologi yang ada dalam Antropologi dan Sosiologi mengenai berbagai corak ragam masyarakat, masyarakat Indonesia yang bercorak Bhineka Tunggal Ika itu dapat digolongkan sebagai *masyarakat majemuk*. Biasanya, ketentraman dalam negara-negara dengan masyarakat majemuk dapat diperkirakan lebih sulit dicapai daripada dalam negara-negara dengan masyarakat seragam. Tulisan ini mencoba menguraikan secara singkat upaya penumbuhan kesadaran hidup dalam suatu masyarakat majemuk, tanpa harus mengabaikan ke Bhineka Tunggal Ika-an masyarakat Indonesia.

## Pengertian Masyarakat Majemuk

Konsep tentang majemuk, *masyarakat majemuk* atau *Plural Society*, tumbuh kembang dari dua tradisi dalam sejarah pemikiran sosial. Konsep yang pertama mengemukakan bahwa *kemajemukan itu adalah suatu keadaan yang memperlihatkan wujud pembagian kekuasaan diantara kelompok-kelompok masyarakat yang bergabung atau disatukan, rasa menyatu itu adalah melalui dasar kesetiaan (bercorak cross-cutting), kepemilikan nilai-nilai bersama (Ting Chew Peh dalam Judistira K.Garna, 1996:164).*

Konsep yang kedua dikemukakan dalam teori-teori masyarakat majemuk, biasanya berkaitan dengan relasi antar ras dan relasi etnis. *Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok ras atau etnik yang berada di bawah*

\*) Pengajar di Jrs. MKDU FPIPS UPI

*satu sistem pemerintahan, karena itu seringkali masyarakat majemuk mengalami konflik, pertentangan dan paksaan. Istilah masyarakat majemuk atau Plural Society pertama kali dikemukakan oleh J.S. Furnivall berdasarkan penelitian di Indonesia dan Birma, yang kemudian secara khusus digunakan bagi merujuk pada masyarakat tropik yang saat itu berada di bawah kekuasaan kolonialis (J.S. Furnivall dalam Judistira K.Garna, 1986:164-165).*

Menurut *Furnivall*, masyarakat majemuk adalah masyarakat terdiri dari berbagai ragam kelompok atau golongan yang memiliki kebudayaan sendiri-sendiri, dengan demikian berbeda pula dalam agama, bahasa dan adat istiadat. Beberapa ciri masyarakat majemuk : (1) walaupun kelompok-kelompok yang tergabung dalam suatu masyarakat itu berada di dalam suatu sistem politik yang sama, tetapi kehidupan mereka sendiri-sendiri; (2) interaksi sosial antar kelompok kurang sekali, dan relasi sosial yang terjadi cenderung terbatas pada sektor ekonomi saja; (3) suatu campuran berbagai kelompok manusia itu dapat dikatakan muncul akibat dominasi kolonialisme; (4) tidak ada atau lemah dalam “*common sense will*” atau keinginan akan kebersamaan sosial, yaitu suatu perangkat nilai-nilai yang disepakati warga masyarakat untuk memberi panduan dan mengontrol tingkah laku sosial warga masyarakatnya (*J.S. Furnivall dalam Judistira K.Garna, 1986:165*).

Jadi, kemajemukan dari suatu masyarakat sering disebabkan oleh berbagai faktor perbedaan yang terdapat diantara kelompok-kelompok, kesatuan sosial, yang tercakup dalam masyarakat tersebut, seperti perbedaan suku bangsa, perbedaan agama, perbedaan diantara lapisan-lapisan penduduk. Sering pranata-pranata sosial yang penting yang terdapat dalam kelompok-kelompok sosial itu sangat berbeda sifatnya. Terdapat stereotip-stereotip yang dimiliki oleh berbagai kelompok mengenai kelompok yang lain, dan stereotipe itu sering mengandung penilaian negatif. Hal semacam inilah yang sering menimbulkan berbagai perpecahan diantara mereka.

Sebagaimana analisis *M.G.Smith* bahwa masyarakat majemuk juga memiliki berbagai kelompok yang kebudayaannya berbagai ragam, sering berlangsung perpecahan dan pertentangan. Sedangkan dari sisi politik, masyarakat majemuk itu dikuasai oleh satu kelompok minoritas yang juga memiliki kebudayaan sendiri; dan masyarakat majemuk

berwujud bukan atas dasar sistem nilai yang sama, tetapi oleh dasar konflik dan paksaan (*M.G. Smith dalam Judistira K.Garna, 1986:165*).

### **Masyarakat Majemuk Indonesia**

Bangsa Indonesia terdiri atas suku-suku, berbicara dengan bahasa daerah, memiliki adat dan memeluk agama yang berbeda pula, dengan latar belakang budaya yang beraneka ragam. Namun tetap merupakan satu bangsa. Kesatuan itu kita tegaskan dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika”, berbeda-beda tetapi tetap satu jua.

Oleh karena itu dapat dinyatakan, bangsa Indonesia hidup dalam *masyarakat majemuk*, masyarakat serba-ganda dalam kepercayaan keagamaannya, ganda dalam ragam kebudayaannya, ganda dalam perilaku kehidupan kemasyarakatannya, tetapi ia adalah satu bangsa. Semboyan “Bhineka Tunggal Ika” menunjukkan ciri keragaman kehidupan bangsa Indonesia, yang sesungguhnya berarti : Justru karena berbeda-beda maka ia satu adanya (*Mattulada, 1985:47*).

Di dalam keragaman itu, bangsa Indonesia hendak membangun diri untuk menjadi satu bangsa yang memperoleh tempat selayaknya disamping bangsa-bangsa lain di dunia ini. Membangun manusia Indonesia seutuhnya, berarti membangun keutuhan dalam budi dayanya untuk berperanan secara penuh, mencapai sasaran-sasaran dalam pengembangan itu, orang-orang Indonesia sebagai individu dan sebagai warga masyarakat bangsa, terlebih dahulu wajib mengetahui, memahami dan selanjutnya mengamalkan prinsip-prinsip dasar yang menjadikan seseorang itu disebut bangsa Indonesia dalam Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Ada berbagai tipe masyarakat majemuk, dan salah satu dari tipe tersebut adalah seperti yang terdapat dalam masyarakat Indonesia, yaitu sebuah masyarakat yang terdiri atas sejumlah golongan suku bangsa yang terwujud dalam satuan-satuan masyarakat dan kebudayaan yang masing-masing berdiri sendiri yang disatukan oleh kekuatan nasional sebagai sebuah negara.

Dalam masyarakat Indonesia yang majemuk, terdapat tiga golongan kebudayaan yang masing-masing mempunyai corak sendiri-sendiri. Ketiga golongan ini satu sama lain saling berbeda tetapi saling berkaitan merupakan suatu kesatuan yang namanya kebudayaan Indonesia. Ketiga golongan kebudayaan tersebut adalah : (1) Kebudayaan

Suku Bangsa (yang lebih dikenal secara umum di Indonesia dengan nama Kebudayaan Daerah); (2) Kebudayaan Umum Lokal dan (3) Kebudayaan Nasional (*Parsudi Suparlan* dalam *A.W. Widjaja*, 1985:81).

Masing-masing kebudayaan ini digunakan oleh orang Indonesia sesuai dengan penggolongan lingkungan dan pola interaksi yang dihadapi dan untuk kerangka acuan (referensi) bagi identitas sesuai dengan pola interaksi dimana dia terlibat didalamnya. Karenanya, masing-masing kebudayaan tersebut bukan hanya menjadi landasan bagi corak pranata-pranata sosialnya, tetapi juga mewarnai corak dari berbagai situasi-situasi sosial yang secara keseluruhan merupakan suasana-suasana kehidupan sosial yang dapat digolongkan sebagai suasana-suasana suku bangsa, suasana umum lokal dan suasana nasional.

### **Ke Bhineka Tunggal Ika-an kebudayaan di Indonesia**

Perbedaan yang hakiki antara manusia, baik secara individu maupun sebagai anggota masyarakat, dengan makhluk hidup lainnya terutama dengan binatang, yaitu terletak pada akal, pikiran dan kemampuan intelektual yang dikaruniakan Allah SWT kepada manusia. Makhluk hidup lain yang bukan manusia, tidak dikaruniai akal ini. Hal yang paling bermakna bagi manusia, akal dan kemampuan intelektualnya, “berkembang dan dapat dikembangkan” (*Nursid Sumaatmadja*, 1996:51-52).

Perkembangan dan pengembangan akal-pikiran manusia menghasilkan apa yang kita sebut “kebudayaan”. Konsep kebudayaan sendiri asalnya dari bahasa Sansekerta, kata *buddhayah*, ialah bentuk jamak dari *buddhi* yang berarti “budi” atau “akal” (*Soerjono Soekanto*, 1990:188). Oleh karena itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai “hal-hal yang bersangkutan dengan budi dan akal”.

Dalam rangka pembangunan bangsa, nampaknya para pendiri negara sejak awal telah menyadari akan arti pentingnya pengembangan perangkat nilai budaya yang dapat mempersatukan masyarakat Indonesia yang majemuk. Hal ini tercermin dalam cita-cita Budi Utomo sebagai pelopor kebangkitan nasional, kemudian dikukuhkan oleh Sumpah Pemuda yang diikrarkan diantaranya untuk menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia, sebagai lambang kebudayaan nasional.

Ketika akhirnya Indonesia merdeka, maka kebudayaan mendapat peranan penting sehingga tercantum dalam pasal 32 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”. Pasal kebudayaan ini sangat penting artinya, karena ia menjadi sumber segala ketentuan dan perundangan yang berkaitan dengan usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan di Indonesia.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 tersebut dijelaskan bahwa kebudayaan bangsa atau kebudayaan nasional ialah kebudayaan yang timbul sebagai usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia, terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus mampu menuju ke arah kemajuan abad, budaya, dan persatuan, tanpa menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Jadi kebudayaan nasional merupakan unsur atau bidang yang merupakan titik singgung semua suku bangsa Indonesia sebagai akibat pergaulan hidup (*Maas DP*, 1986:155).

*Koentjaraningrat* mengatakan bahwa kebudayaan nasional Indonesia berfungsi sebagai pemberi identitas kepada sebagian warga dari suatu nasion, merupakan kontinuitas sejarah dari zaman kejayaan bangsa Indonesia di masa lampau sampai kebudayaan nasional masa kini. Jadi, keseluruhan gagasan kolektif dari semua warga negara Indonesia yang beranekawarna itulah yang merupakan kebudayaan nasional Indonesia dalam fungsinya untuk saling berkomunikasi dan memperkuat solidaritas. Berdasarkan fungsinya, kebudayaan nasional (*Koentjaraningrat* dalam *M. Munandar Soelaeman*, 1988:43) adalah :

- a. Suatu sistem gagasan dan perlambang yang memberi identitas kepada warga negara Indonesia.
- b. Suatu sistem gagasan dan perlambang yang dapat dipakai oleh semua warga negara Indonesia yang bhineka itu, saling berkomunikasi dan dengan demikian dapat memperkuat solidaritas.

Fungsi kebudayaan nasional Indonesia sebagai suatu sistem gagasan dan perlambang yang memberikan identitas kepada warga negara Indonesia harus memenuhi tiga syarat (*M. Munandar Soelaeman*, 1988:43) yaitu :

1. Merupakan hasil karya warga negara Indonesia;
2. Mengandung ciri-ciri khas Indonesia dan
3. Hasil karya warga negara Indonesia yang dinilai tinggi oleh warganya dan menjadi kebanggaan semua.

Letak Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang terbesar dari Sabang hingga Merauke telah melahirkan beberapa bahasa dan adat istiadat. Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia menunjukkan sesuatu kekayaan budaya yang merupakan modal dan landasan bagi pengembangan budaya bangsa seluruhnya, yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa. Kebhinekaan sistem sosial dan budaya Indonesia merupakan kenyataan yang tidak mungkin diingkari. Dengan keanekaragaman yang ada pada bangsa Indonesia ini tidak diharapkan menuju ke arah perpecahan, tapi harus menuju pada persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagaimana makna yang terkandung dalam slogan “Bhineka Tunggal Ika” (berbeda-beda tetapi tetap satu jua).

Selain itu, kemajemukan masyarakat Indonesia dapat dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 telah melahirkan suatu kebulatan tekad para pemuda dan seluruh rakyat Indonesia yang menyatakan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kebulatan tekad tersebut bukanlah hanya sekedar tekad yang tidak bermakna, melainkan merupakan suatu pernyataan tekad yang hakiki karena dengan adanya bahasa persatuan berarti bangsa Indonesia telah bertekad untuk memelihara keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi tidak lepas dari lingkungan kehidupan kemanusiaan, baik secara individual, maupun secara kemasyarakatan. Secara individual berhubungan erat dengan bahasa ibu (bahasa yang diperoleh pertama kali), secara kemasyarakatan berhubungan erat dengan bahasa nasional (bahasa Indonesia). Sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengungkap asas peradaban bangsa Indonesia dalam negara. Pasal 36 UUD 1945 berbunyi , “ Bahasa negara adalah bahasa Indonesia”. Dan penjelasan pasal 36 mengungkapkan : di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyatnya dengan baik-baik (misalnya bahasa Jawa, Sunda dan Madura) bahasa itu akan dihormati dan dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu merupakan sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup. Bahasa Indonesia

dan bahasa daerah memiliki fungsi masing-masing, sesuai dengan kebijakan bahasa di Indonesia. Disinilah letak keunikan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia benar-benar berfungsi sebagai alat komunikasi suku bangsa yang beraneka ragam (*T. Fatimah Dj. Idat dalam Judistira K.Garna, 1993:73*). Sejalan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka membina persatuan dan kesatuan bangsa, kita harus memiliki kesadaran dan kebanggaan berbahasa Indonesia dan menggunakannya dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa.

Budaya bangsa sebagai perwujudan cipta, rasa, karsa dan karya bangsa Indonesia yang dilandasi nilai luhur bangsa berdasarkan Pancasila, bercirikan Bhineka Tunggal Ika dan berwawasan nusantara, harus diupayakan agar senantiasa menjiwai perilaku masyarakat dan pelaksana pembangunan. Serta membangkitkan rasa kesetiakawanan dan tanggung jawab sosial dan disiplin serta semangat pantang menyerah. Kebudayaan nasional yang merupakan puncak-puncak kebudayaan daerah harus mengangkat nilai budaya yang luhur, menyaring dan menyerap nilai budaya dari luar yang positif dan sekaligus menolak nilai budaya yang merugikan pembangunan dalam upaya menuju ke arah kemajuan adab dan mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia terus ditingkatkan sehingga mampu menjadi wahana komunikasi sosial serta wahana ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yang akhirnya diharapkan mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.

## **Penutup**

Berhasilnya usaha pembangunan dewasa ini tidak terlepas dari pentingnya semangat kerja sama, persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia karena pembangunan nasional pada dasarnya merupakan tanggung jawab seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, dengan jiwa dan semangat Bhineka Tunggal Ika hendaknya senantiasa dibina dan dipelihara serta ditingkatkan terus jiwa, semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbhineka Tunggal Ika hendaknya kita senantiasa memajukan pergaulan diantara suku-suku bangsa yang ada di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.W. Widjaja, 1985, *Manusia Indonesia Individu, Keluarga dan Masyarakat Topik-topik Kumpulan Bahan Bacaan Mata Kuliah Ilmu Sosial dasar*, Jakarta, Akademika Pressindo
- Budi Rajab, 1996, *Pluratitas Masyarakat Indonesia Suatu Tinjauan Umum*, Prisma No. 6, Jakarta, LP3ES
- Harsya W. Bachtiar, 1985, *Budaya dan Manusia Indonesia*, Yogyakarta, yp2lpm-Hanindita
- Haryati Subadio, 1985, *Budaya dan Manusia Indonesia*, Yogyakarta, yp2lpm-Hanindita
- Ismaun, 1991, *Diktat Kuliah MKDU Pendidikan Pancasila*, IKIP Bandung
- Judistira K.Garna, 1993, *Tradisi Transformasi Modernisasi dan Tantangan Masa Depan di Nusantara*, Bandung, Program Pascasarjana Universitas padjajaran
- \_\_\_\_\_, 1986, *Ilmu-ilmu Sosial Dasar-Konsep-Posisi*, Bandung, Program Pascasarjana Universitas Padjajaran
- \_\_\_\_\_, 1998, *Teori Kebudayaan dalam Menjawab Krisis*, Makalah untuk Seminar Sehari Refleksi Sosial Budaya dalam Situasi Ekonomi Krisis diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Penelitian Universitas Padjadjaran Bandung
- Maas DP, 1986, *Antropologi Budaya (Keanekaragaman Kebudayaan Indonesia)*, Jakarta, Penerbit Karunika Universitas Terbuka
- M. Munandar Soelaeman, 1988, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, Bandung, PT. ERESKO
- Nursid Sumaatmadja, 1996, *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya dan Lingkungan Hidup*, Bandung, Alfabeta
- Soerjono Soekanto, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Rajawali Pers
- Wahjudin Sumpeno, 1996, *Orientasi Pendidikan Politik dalam Membina Nilai-nilai Moral*, Mimbar Pendidikan No. 4 Th. XV, University Press IKIP Bandung

### **Dokumen :**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

